

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Gender

Gender sudah menjadi perbincangan hangat dalam setiap bidang ilmu baik di dunia ekonomi, politik, pendidikan, bahkan menjadi wacana dalam pembahasan serius maupun pembicaraan ringan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui wacana gender muncul sebagai dekonstruksi terhadap budaya patriarki yang telah menghegemoni pemikiran masyarakat yang hampir tiga ribu tahun lamanya.

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender*. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris pengertian antara sex dan gender tidak dibedakan secara jelas. Seringkali gender disamakan dengan seks atau jenis kelamin, maka untuk memahami konsep gender kita harus mampu membedakan antara kata gender dan seks. Pengertian seks merupakan pembagian dua jenis kelamin atau penyifatan manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan dan alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan dengan kodrat atau ketentuan Tuhan, Nugroho (2011: 2).

Fakih (2016: 75) menyatakan *Sex*, berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin. Gender disebut sebagai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultur yang panjang.

Dalam *the cultural construction of sexuality* sebagaimana yang diuraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekedar biologis, akan tetapi melalui proses kultur dan sosial. Dengan demikian gender dapat berubah dari waktu, tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah seperti pendapat Illich (2007: 44) bahwa gender adalah sesuatu yang lain dan lebih dari sekedar jenis kelamin. Polaritas sosial yang bersifat fundamental dan takkan serupa di dua tempat yang berlainan

Ideologi gender, menurut pemikiran Rogers (dalam Widayani dan Hartati: 2014) menjelaskan bahwa adanya hubungan konseptual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan konseptual ini dapat dipelajari dengan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan dalam ideologi dan perilaku laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam ideologi ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan menganggap dirinya masing-masing secara mendasar berbeda satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan diharapkan mempunyai persepsi tersendiri mengenai nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan.

Handayani dan Sugiarti (dalam Rahmawati: 2016) mengatakan gender adalah konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, sifat yang dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat melainkan dibedakan atau dipilah menurut fungsi, kedudukan, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender adalah suatu konsep kultur yang berhubungan dengan karakteristik yang membedakan antara perempuan dan laki-laki baik secara perilaku, biologis, melintas, dan sosial budaya. Laki-laki dan perempuan secara seksual memang berbeda, begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu.

Tiap individu dalam memandang kesetaraan dan keadilan gender dapat memiliki pemahaman yang berbeda meskipun mempunyai latar belakang yang sama. Pemahaman yang berbeda ini disebabkan karena selain manusia itu merupakan individu yang unik dan *individual*

differences, individu-individu tersebut memiliki faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi konsep berpikir dan mempersepsikan suatu pengalaman, termasuk pula pengalaman mengenai budaya Bali dihubungkan dengan pemaknaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Maka dapat didefinisikan sebagai aturan atau normal perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat atau interaksi sosial yang membedakan perilaku antara laki-laki dan perempuan baik secara moral, etika dan budaya. Bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral, etika dan budaya dimana mereka berada.

a. Ketimpangan Gender

Nugroho (2011: 9) menyatakan ketimpangan gender merupakan struktur dan sistem dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut:

1) Marginalisasi

Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian. Antara lain penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender namun yang dipermasalahkan adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Fakih (2016: 14) menyatakan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi atau pembatasan dalam pengambilan keputusan

terjadi karena diperkuat juga oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Menurut Yuarsin (dalam Widayani dan Hartati: 2014) menyatakan bahwa perempuan memiliki lebih banyak aturan yang harus ditaati dan berarti juga perempuan lebih banyak melaksanakan tugas, kondisi demikian yang membuat kedudukan laki-laki menjadi semakin dominan.

2) Subordinasi

Nugroho (2011: 11) Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan perempuan tidak bisa mengambil peran sebagai pemimpin, ini merupakan bentuk dari subordinasi.

Proses ini disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berumah tangga banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Seperti peraturan yang dikeluarkan pemerintah jika seorang suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) suami dapat mengambil keputusan sendiri sementara seorang istri harus mendapatkan izin suami. Dalam sebuah rumah tangga misalnya, dalam kondisi keuangan rumah tangga yang terbatas, masih sering terdengar adanya adanya prioritas untuk bersekolah bagi kaum laki-laki dibanding kaum perempuan, karena ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Karena pada akhirnya akan kembali ke dapur. Hal seperti ini sesungguhnya muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.

Menurut Bhasin (2001: 63) Subordinasi memiliki arti diletakkan dibawah atau kedudukan didalam sebuah posisi yang inferior dihadapan orang lain, atau menjadi tunduk terhadap

kontrol atau otoritas yang lain. Kekuasaan tersebut sebenarnya berasal dari perasaan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki merasa dirinya sebagai makhluk utama. Jadi dapat diartikan subordinasi ialah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi. Sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Hal itu dapat terjadi karena keyakinan terhadap jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih unggul ialah laki-laki., dan telah dikonsepsikan secara turun temurun.

Pembagian peran perempuan dengan laki-laki seringkali mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi akibat pemikiran yang bias gender. Bias gender adalah prasangka atas konstruksi sosial yang berupaya menundukkan perempuan dalam kedudukan tradisional, lebih lemah dibanding laki-laki, hanya sebagai objek komoditas, secara cenderung di eksploitasi atas fisiknya sendiri. Hal ini terjadi karena gender terbentuk oleh masyarakat patriarki sehingga peran laki-laki dan perempuan seolah-olah telah terbentuk secara paten. Akhirnya ketimpangan gender merupakan manifestasi atas ketidakadilan gender. Manifestasi tersebut dapat terjadi dalam beberapa tataran yakni dalam tataran kerja, organisasi, tempat kerja, tafsiran keagamaan dan keluarga serta dalam tataran adat istiadat, dan kultur suku-suku.

3) Stereotipe

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu seringkali disebut sebagai stereotipe. Akibatnya dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan gender. Nugroho (2011: 12) Salah satu

bentuk stereotipe adalah yang bersumber dari pandangan gender, banyak sekali bentuk stereotipe yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.

Sebagai contoh adalah adanya keyakinan dimasyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan perempuan boleh dibayar lebih rendah dibanding laki-laki. kemudian adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan bersolek biasanya dilakukan untuk memancing perhatian laki-laki, sehingga pada beberapa kasus kekerasan maupun pelecehan seksual hal ini selalu dikaitkan bahkan perempuan selalu pada posisi yang disalahkan, selain itu anggapan yang ada di masyarakat yang melihat bahwa tugas perempuan adalah melayani suami, pelabelan ini merupakan hal yang wajar, namun berdampak pada menomorduakan pendidikan bagi kaum perempuan. Stereotipe pada contoh diatas dapat terjadi dimana-mana.

4) **Violence (Kekerasan)**

Violence (Kekerasan) merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti *sexual harassment* (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. Kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi karena stereotipe gender. Pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi sebenarnya disebabkan bukan karena unsur kecantikan melainkan karena kekuasaan dan stereotipe gender

yang dilakukan pada kaum perempuan. Gender *violence* pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. *Violence* yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender relate violence*. Nugroho (2011: 13)

Fakih (2016: 18-21) menjelaskan delapan bentuk kekerasan yang berbasis pada bias gender antara lain sebagai berikut:

- a) **Pemerksaan.** Kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat berdampak pada fisik maupun psikologis korbannya, dalam hal ini adalah perempuan namun tidak menutup kemungkinan adanya kasus pemerksaan pada laki-laki. perksaan di definisikan sebagai perilaku memaksa untuk mendapatkan pelayanan atau kepuasan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Kondisi tanpa kerelaan ini seringkali tidak tersekspresikan karena berbagai kondisi, misalnya kondisi ketakutan malu, keterpaksaan secara ekonomi dan sebagainya. Pemerksaan juga termasuk di dalamnya dalam konteks pernikahan atau perkawinan seperti kawan paksa.
- b) **Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk diantaranya penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).**
- c) **Penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, kekerasan ini mencakup sunat pda perempuan. Sunat ini secara historis lebih dimaknai sebagai dominasi laki-laki ata perempuan ketimbang alasan medis.**
- d) **Pelacuran atau prostitusi.** Sebagian tokoh dan pejuang gender memandang pelacuran sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suatu mekanisme ekonomi (semacam transaksi jual beli) yang lebih merugikan pihak perempuan. Setiap mayarakat dan negara selalu menggunakan standar

- e) ganda terhadap pekerjaan seksual ini. Disatu sisi pemerintahan melarang, tetapi disisi lain juga menarik pajak dari praktik portitusi tersebut.
- f) Ponografi, kekerasan ini merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan sebab kekerasan ini nonfisik atau sering diartikan sebagai eksploitasi tubuh perempuan untuk sebuah industri hiburan di mana dijalankan oleh kaum laki-laki dan untuk kepuasan seksual konsumennya dimana konsumen tersebut umumnya adalah laki-laki.
- g) Kekerasan dalam konsepsi, Sebagian besar alat kontrasepsi didesain untuk digunakan oleh perempuan. Padahal yang merasakan kenikmatan hubungan seksual bukan hanya perempuan. Alat kontrasepsi laki-laki walaupun diciptakan tetapi tidak sebanyak alat kontrasepsi untuk perempuan. Selain itu, sterilisasi atau tubektomi lebih dominan diinginkan oleh laki-laki sementara orang yang dioperasi adalah dalam tubuh perempuan.
- h) Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), kekerasan ini biasa terjadi diruang publik dimana ruang tersebut sangat padat dan dijadikan kesempatan bagi para pelaku kekerasan ini untuk mrlakukan aksinya. Misalnya didalam bus kota yang penuh dan sesak, beberapa pelaku kekerasan ini sengaja berada di tengah bus tersebut dan kemudian mengesek-ngesekkan alat kelaminnya kepada perempuan korbannya.
- i) Pelecehan seksual, kekerasan ini banyak terjadi pada masyarakat umum namun tidak semua perempuan memahami bahwa perilaku tersebut masuk kedalam pelecehan seksual. Misalnya, bersiul terhadap perempuan yang lewat di depannya, mencolek bagian tubuh tertentu dari perempuan yang lewat di depannya, mencolek bagian tubuh tertentu dari perempuan walaupun terkesan sekadar lelucon atau candaan,

bertanya atau mengintrogasi mengenai kehidupan atau kegiatan seksual seseorang dan lain sebagainya.

Kedelapan bentuk kekerasan diatas menepatkan perempuan sebagai korban dan hampir seluruhnya dari kekerasan tersebut terkait dengan adanya perbedaan kekuasaan (*power*) antara laki-laki dan perempuan yang disengaja dan diatur sedemikian rupa agar perempuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menghindar.

5) **Beban kerja**

Fakih (2016: 22) menyatakan bahwa adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga yang mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Maka dari itu kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya. Membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga memelihara anak adalah tugas kaum perempuan. Dikalangan keluarga miskin beban kerja yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka memikul beban kerja ganda.

Beban kerja yang diakibatkan oleh bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan. Pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan berkaitan dengan anggapan gender sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di

lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

Nugroho (2011: 17-18) menyatakan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja telah terjadi diberbagai tingkatan di masyarakat. (1) Wujud dari ketidakadilan gender terjadi ditingkatan negara, baik pada satu negara maupun organisasi antara negara. Banyak kebijakan dan hukum negara perundang-undangan secara program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. (2) Wujud dari ketidakadilan gender ini juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen kebijakan, keorganisasian dan kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. (3) adat istiadat atau tradisi dibanyak kelompok etnik masyarakat, kultur suku-suku maupun dalam tafsiran keagamaan wujud ketidakadilan gender ini pun terjadi. Mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender. (4) ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga, mulai dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, hingga interaksi antar anggota keluarga, di dalam banyak rumah tangga sehari-hari asumsi bias gender ini masih digunakan. Dengan demikian rumah tangga pun menjadi tempat yang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender. (5) Ketidakadilan gender yang sudah mengakar di dalam suatu keyakinan dan menjadi ideologi bagi kaum perempuan maupun laki-laki, hal seperti ini sudah sangat sulit diubah.

Uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah

mengakar mulai dari keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara yang bersifat global. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut secara dialektika saling memengaruhi dan saling terkait, manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang akhirnya lambat laun baik laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan pada akhirnya diyakini bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan suatu kodrat. Struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima lambat laun mulai tercipta dan sudah tidak lagi dirasakan ada sesuatu yang salah.

b. Relasi Gender dalam kehidupan Masyarakat

Realisasi gender adalah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Relasi gender dapat berupa dominan (menguasai), subordinasi (dikuasai), dan setara. Seperti yang dikemukakan Umar (dalam Tripungkasingtyas 2013) bahwa relasi gender merupakan sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas, peran, dan *skill* berdasarkan konvensi sosial.

● Dalam masyarakat yang patriarkis relasi gender dilandasi hukum kebabakan. Juliet Mitchel adalah seorang feminis ahli dalam bidang psikologi yang menyatakan (dalam bhasin: 1996) bahwa menggunakan kata patriarki untuk menyebut sistem kekerabatan dalam nama laki-laki mempertaruhkan perempuan, dan merujuk kekuatan simbolis yang dijalankan oleh ayah dalam sistem ini. Kekuasaan ini katanya menyebabkan psikologi perempuan menjadi “diinferiorkan”. Melekat dalam sistem ini adalah *ideologi* yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki.

Teori *nature* beranggapan perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan

oleh konstruksi masyarakat. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan, sesungguhnya bukanlah kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai bias gender yang banyak terjadi di masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis, sesungguhnya tidak lain konstruksi budaya (Nugroho, 2011: 22-23).

Murtiani (dalam Tripungkasingtyas 2013) menyatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat hierarkis, yakni laki-laki berada pada posisi yang dominan dan perempuan berada pada posisi yang subordinat. Haruslah diakui bahwa posisi perempuan dalam kebudayaan tidaklah sebaik posisi laki-laki. Hampir semua kebudayaan di dunia, perempuan menempati posisi belakang. Perjalanan budaya patriarki makin kuat dan mantap ketika terjadi perubahan sosial ke masyarakat feodal. Kemudian masyarakat feodal berkembang menjadi masyarakat kapitalis dan kemudian dikunci dengan sistem militerisme.

Keberadaan perempuan dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarki telah menciptakan berbagai masalah yang bukan saja berdampak pada kaum perempuan melainkan terstruktur dalam aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya yang semua itu mendorong kesuatu arah pola relasi komunikasi yang dikotomis. Gambaran hubungan laki-laki dan perempuan telah menjadi realitas sosial yang telah terbentuk secara historis oleh berbagai proses sosial yang kemudian menjadi suatu susunan kekuasaan tempat perempuan berada pada posisi yang ter subordinasi di dalam kehidupan seksual. Perempuan harus memenuhi segala macam standar yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standar merupakan nilai objektif yang meminta keputusan-keputusan sehingga menjadi praktik yang terus menerus berulang didalam kehidupan sosial.

c. Peran Gender dalam Masyarakat

Peran gender berhubungan dengan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang secara sosial dirumuskan berdasarkan polarisasi stereotipe seksual maskulinitas feminitas (Fakih, 2012: 16). Contoh peran gender, misalnya laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah sedangkan perempuan memiliki tugas untuk melayani suami. Sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (Nugroho, 2011: 11).

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lama dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan (Nugroho, 2011: 16).

2. Hegemoni Patriarkat

Konteks kajian gender dikemukakan bahwa hubungan antara perempuan dengan laki-laki, serta pembagian peran sosial dan privat antara perempuan dengan laki-laki telah diatur oleh sebuah ideologi gender yang dikenal dengan istilah patriarkat. Patriarkat adalah sistem hubungan antara jenis kelamin yang dilandasi hukum kepapakan. Patriarkat adalah sebuah sistem dari struktur sosial, praktik yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan meneksploitasi perempuan. Walby membuat sebuah teori tentang patriarkat. Menurutnya, patriarkat itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu patriarkat privat dan patriarkat publik. Inti dari teorinya itu adalah telah terjadi ekspansi wujud patriarkat, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Ekspansi ini menyebabkan patriarkat terus menerus

berhasil mencengkeram dan mendominasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Dari teori tersebut, dapat diketahui bahwa patriarkat privat bermuara pada wilayah rumah tangga. Wilayah rumah tangga ini dikatakan sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan patriarkat publik menempati wilayah-wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Ekspansi wujud patriarkat ini merubah baik pemegang “struktur kekuasaan” dan kondisi di masing-masing wilayah (baik publik atau privat). Dalam wilayah privat misalnya, dalam rumah tangga, yang memegang kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, yang memegang kunci kekuasaan berada di tangan kolektif.

Hegemoni patriarkat terus menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi, bahkan juga melalui undang-undang dan kekuasaan negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, terutama pasal 31 ayat 3, yang masih digunakan di Indonesia sampai sekarang misalnya dikemukakan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1), sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2). Dengan pembagian peran yang demikian berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak, dan kewajiban melayani suami (Arivia, 2006: 437).

Demikian juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama pasal 105, ayat 1, dinyatakan bahwa setiap suami adalah kepala keluarga dalam penyatuan suami dan istri; pasal 106 ayat 1, setiap istri harus mematuhi suaminya; pasal 106, ayat 2, sudah merupakan keharusan bagi istri untuk hidup bersama suaminya; pasal 124, ayat 1 dinyatakan bahwa suami mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas aset-aset perkawinan dan kepemilikan, termasuk seluruh kepemilikan pribadi

istri dan yang dimiliki saat menikah (Arivia, 2006: 438). Hegemoni patriarkat dalam ranah domestik tampak disosialisasikan melalui Panca Dharma Wanita. Di dalamnya dikemukakan bahwa wanita sebagai: 1) pendamping suami, 2) ibu sebagai pendidik dan pembina generasi muda 3) pengatur ekonomi rumah tangga, 4) pencari nafkah tambahan, 5) anggota masyarakat terutama organisasi wanita, badan-badan sosial yang intinya menyumbangkan tenaga kepada masyarakat sebagai relawan. Dari sini tampak bahwa Panca Dharma Wanita menempatkan perempuan sebagai ter subordinasi oleh laki-laki. Dalam hubungannya dengan laki-laki, perempuan dianggap sebagai pendamping suami, pencari nafkah tambahan dan bukan sebagai perempuan karier. Panca Dharma Wanita ikut melahirkan sekaligus menjadi bidan munculnya ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki. Dilihat dari segi emansipasi, Panca Dharma Wanita tidak mengizinkan adanya kesetaraan atau keseimbangan antara suami dan istri.

Adanya hegemoni patriarkat dalam ranah privat dan publik akan menimbulkan ketidakadilan gender karena masyarakat menempatkan perempuan lebih pada tugas-tugas domestik, sementara tugas-tugas publik merupakan wilayah laki-laki. Akibatnya, kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan maupun kesempatan bekerja di sektor publik menjadi dinomorduakan.

3. Tradisi Bali dalam Sudut Pandang Antropologi

Menurut Ratna analisis antropologis adalah usaha untuk mencoba memberikan identitas terhadap karya dengan menganggap bahwa karya tersebut mengandung aspek tertentu, dalam hubungan ini ciri-ciri kebudayaannya. Ciri-cirinya, di antaranya: memiliki kecenderungan ke masa lampau, citra primordial, citra arketipe. Ciri-ciri yang lain misalnya mengandung aspek-aspek kearifan lokal dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing, berbicara mengenai suku-suku bangsa dengan subkategorinya, seperti; trah, klen, dan kasta (Ratna,2011:31, 39-40).

Antropologi sastra dalam pandangan Poyatos adalah ilmu yang mempelajari sastra berdasarkan penelitian antarbudaya. Penelitian budaya

dalam sastra tentu diyakini sebagai refleksi kehidupan (Endraswara, 2015: 3-4). Aspek-aspek antropologis dalam karya sastra, meliputi sistem pengetahuan, adat-istiadat, sistem kekerabatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, kesenian, serta sistem kepercayaan dan agama (Sudikan, 2007: 6). Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur-unsur budaya sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2015: 165) bahwa unsur budaya terdiri atas tujuh bagian di antaranya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membagi sebagian besar hidup mereka bersama-sama. Terdapat jenis kekerabatan yang menganut prinsip patrilineal atau menganut garis keturunan ayah atau pihak laki-laki dan prinsip matrilineal atau menganut garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan serta prinsip-prinsip kombinasi seperti kekerabatan ambilineal dan bilineal. Masyarakat yang bersifat patriarkal dapat dijumpai di berbagai tempat karena mayoritas masyarakat mempraktikkan prinsip keturunan ini.

Sebagaimana halnya hegemoni budaya *patriarki* terhadap pemikiran dunia. Budaya *patriarki* juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentjaraningrat dalam Sudarta, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. (Sudarta, 2006). Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya secara dominan oleh Masyarakat Bali, yang dalam ajarannya sangat memuliakan perempuan, bahkan perempuan dianggap sebagai "*sakti*" (memiliki kekuatan mistis) bagi laki-laki. Bahkan menurut Saiva Siddhanta sakti bukanlah "*maya*", tetapi faktor abadi yang penting, yang bekerja sama dengan "*Siva*" di mana tanpa ada kerja sama dengan-Nya, Siva tidak memiliki daya dan tak mampu menghasilkan keberadaan alam semesta yang tersembunyi dalam diri-Nya (Maswinara, 2006: 292).

Perempuan dalam Hindu dipuja sebagai Dewi. Sebagaimana diceritakan dalam Kitab Purana-purana Hindu “*Brahman*” dalam manifestasi beliau sebagai “*Tri Murti*” selalu dihadirkan berpasangan dengan “*sakti*” seperti Dewa Brahma dengan saktinya yaitu Dewi Saraswati dalam melakukan tugas beliau sebagai pencipta, Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Laksemi sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa dengan Saktinya Dewi Parwati sebagai pelebur (Rahmawati, 2015: 59)

Pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di Bali. Di mana dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dalam hal kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, pewarisan dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bali dan juga dalam peranannya di Masyarakat. Laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima yang diputuskan oleh laki-laki.

Sebagaimana yang dikatakan Surpha (2006) bahwa Masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. Pandangan hidup tersebut mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan pikiran-pikiran mendalam mengenai wujud kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, khususnya dalam penerapan hukum adat di Bali masih sangat kontras dengan adanya ketidaksetaraan gender. Hukum adat di Bali sangat kental dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana di dalam Hukum Adat Bali kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Budaya patriarki masih memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Menurut Rahmawati (2015: 59) Terutama dalam hal perkawinan adanya konsep *purusa* dan *predana* yang dianut oleh Masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran Agama Hindu tentang jiwa (*purusa*) yang identik dengan laki-laki dan material (*predana*) yang identik dengan

perempuan. Di mana dalam Konsep Hindu jiwa melambangkan keabadian, materi sebagai sesuatu yang tidak kekal. Kalau dilihat dari Filsafat Sankhya maka *purusa* (jiwa) sebagai spirit, roh atau rohani, dan *Predana* disebut sebagai *prakerti* (materi/ kebendaan) yang mana kedua unsur (asas) inilah yang membentuk dunia ini (*bhuwana agung*). Tetapi akan sangat keliru jika kemudian konsep *predana* dan *prakerti* ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam Pandangan Hindu disebut *bhuwana alit* memiliki kedua asas tersebut.

Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (*predana*) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (*purusa*), sehingga perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Hal ini tentunya sangat terkait dengan pemberlakuan adat istiadat yang mengatur kehidupan Masyarakat Bali yang masih belum mencerminkan kesetaraan gender. Di mana Perempuan Bali jika sudah menikah dia sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, tanpa adanya banyak perdebatan. Bahkan semasih kecil Perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi milik keluarga lain. Begitu juga dalam hal pembagian waris bagi perempuan yang sudah menikah keluar dari keluarga, tentunya namanya pun dihapuskan dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Dan dalam bayangan akan mendapatkan warisan dari pihak keluarga laki-laki sesuai hak yang dimiliki suaminya. Tapi dalam kenyataan warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu.

Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan yaitu dengan menggunakan kata “*ngayahin*” yang diartikan sebagai “*melayani*”. Akan beda artinya jika laki-laki pada saat

meminang perempuan dengan menggunakan kata-kata “*mendampingi*” yang mencerminkan kedudukan yang setara antara suami dan istri. Hal ini senada dengan ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yang disampaikan oleh Holleman dan Koentjaraningrat dalam Sudarta (2006) sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orang tua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain perempuan yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda. Hal ini tentunya tidak jadi masalah jika si perempuan memiliki bekal kemandirian secara finansial, karena dia tidak akan pusing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jika si perempuan sendiri tidak memiliki *skill* yang cukup maka di sana akan menjadi masalah sehingga besar kemungkinan akan terjadinya marginalisasi terhadap si perempuan dari keluarga laki-laki apalagi didukung oleh ketiadaan keberpihakan suami terhadap istrinya. Tidak hanya sampai di situ dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir Masyarakat Bali secara signifikan, sehingga saat ini banyak keluarga yang hanya memiliki anak perempuan terancam *putung* (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau *nyentana/ nyeburin* (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan). Karena dalam pandangan Masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya patriarki dengan menikah *nyeburin (nyentana)* laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga (kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan).

Budaya Patrilineal khususnya yang memengaruhi Hukum Adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali, di mana tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak

perempuannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain. Hal ini tentunya memicu terjadinya kesenjangan dalam kehidupan sosial di masyarakat, di mana perempuan selalu menjadi sosok yang didominasi oleh pihak laki-laki. Keadaan ini sangat kontradiktif dengan semangat kesetaraan gender yang menginginkan kebersamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.

Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan. Di mana perempuan (*predana*) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (*purusa*). Perempuan Bali memandang kerja sebagai suatu persembahan (*yadnya*) sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan Perempuan. Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban, walaupun sebenarnya Perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya.

4. Perempuan dalam Realitas Sosial Masyarakat Bali

Nugroho (2011: 129) menyatakan dimata orang Bali tidak ada yang lebih tercela dari pada seorang wanita yang telah bersuami yang tidak atau hanya mempunyai seorang anak saja. Perempuan Bali yang tidak tahan mengurus rumah tangganya sendiri sering mengusulkan suaminya untuk mencari istri lagi. Sulit dipikirkan apa yang dinamakan kebahagiaan rumah tangga bagi kaum perempuan. Undang-undang juga tidak memberinya hak untuk itu. Selain itu, kaum perempuan sudah terlalu lama menjadi korban sehingga tidak lagi mengharapkan yang tidak-tidak dalam hal ini. Perempuan sudah puas dan harus merasa puas dengan bagian yang diberi oleh suaminya dari hati dan hartanya. Sebagai imbalan perempuan diminta untuk mengorbankan segala yang dimilikinya untuk mengabdikan pada

suaminya yang sah dan terutama untuk menghindarkan aib agar tidak ditinggalkan kepada para keturunannya. Perempuan Bali mempunyai tugas untuk menghasilkan apapun yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Selain itu juga, perempuan Bali diharuskan untuk melahirkan anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Jika istri melahirkan dua atau lebih anak keturunannya maka anak perempuan tidak masuk dalam hitungan. Begitu pula sebaliknya, istri mandul atau tidak dapat melahirkan anak keturunan atau hanya bisa melahirkan anak perempuan saja, maka istri akan kehilangan kebahagiaan dalam keluarganya.

Selebihnya istri adalah pelayan atau budak dari suaminya. Tak jarang disetiap sudut baik di rumah, di pasar, di sawah-ladang maupun di tempat-tempat lain, dimana-mana mencolok mata bahwa kaum perempuanlah yang melakukan pekerjaan terbanyak dan terberat. Sekalipun mempunyai kelebihan karena bentuk yang indah dan raut muka yang bagus, tetapi mereka mempunyai aroma muka yang agak keras dan kasar yang disebabkan oleh pekerjaan berat yang ditugaskan kaum laki-laki kepadanya. Kaum laki-laki sering duduk-duduk saja berpangku tangan dan kaum perempuan sangat sibuk sekali. Tak jarang perempuan yang menjunjung bungkusan berat diatas kepalanya tanpa dipegang dibawah terik sinar matahari dan para suami tercinta sedang bermain judi dan mengadu ayam menghabiskan uang yang dicari istrinya dengan susah payah.

Nasib kaum wanita yang tinggal dirumah jauh dari menimbulkan iri hati. Apakah mereka kaya atau miskin, dari keturunan bangsawan atau rendahan, mereka tidak pernah mempunyai waktu senggang. Semua urusan diserahkan suami kepadanya yang lebih suka melihat istrinya menjadi kurus merana karena tekanan pekerjaan-pekerjaan dari pada memperkenankan dirinya menggaji seorang pembantu rumah tangga. Menanan nasi, menenun kain, mengumpulkan hasil sawah-ladang,

memberi makan kepada anjing, babi dan ayam, segalanya menanti untuk dikerjakan istri.

Pada zaman Kolonial dan juga hingga dekade awal kemerdekaan, masyarakat Bali pada umumnya kurang mendorong perempuan untuk bersekolah. Mereka memandang bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga, bukan mengejar karir di dunia publik. Ungkapan rumah *bertembok batu* mungkin lebih tepat dipahami sebagai kiasan bahwa tradisilah yang menghalanghalangi perempuan Bali menikmati kemajuan. Orang pertama yang paling kejam terhadap perempuan Bali adalah ayahnya yang bahkan tidak akan memperlakukannya setara dengan anak-anaknya yang lain. Hanya anak laki-laki yang di anggap sebagai keturunannya atau sebagai penerusnya. Seorang ayah akan memperlakukan mereka dengan penuh kebanggaan serta limpahan kasih sayang. Berbeda dengan perempuan sejak usia enam atau tujuh tahun, perempuan Bali mulai bekerja, mereka akan pergi ke pasar bersama ibunya membawa beban berat di atas kepala atau melakukan hal-hal lain sesuai naluri bisnis mereka misalnya menjual kue atau makanan di sepanjang jalan.

prinsip yang terpenting dan terdapat pada sebagian keluarga dari masyarakat Bali adalah prinsip patrilineal yang menghitung hubungan kekerabatan melalui garis ayah. Dalam hal ini, apabila pasangan suami istri tidak mempunyai anak, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak, dan cenderung mengangkat anak laki-laki untuk melanjutkan kelangsungan hubungan kekerabatan keluarga. Apabila sepasang suami istri yang hanya mempunyai anak perempuan, akan berusaha mengambil sentana (*perkawinan nyeburin*) untuk terpeliharanya prinsip patrilineal.

5. Perlawanan Perempuan dalam diskriminasi

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan manusia, sebuah novel sastra diciptakan bukan untuk tujuan estetis semata namun juga sebagai bentuk perlawanan yang merupakan perlawanan yang bersifat simbolis. Hal ini karena perlawanan tersebut dilakukan melalui kata-kata dan gagasan yang diungkapkan dalam sebuah novel. Sebagai mana

dikemukakan oleh Damono (dalam Kratz, *ed.*, 2000: 650–653) bahwa sastra mencerminkan persoalan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, kalau pengarang memiliki taraf kepekaan yang tinggi, karya sastra yang dihasilkannya juga mencerminkan kritik sosial yang ada dalam masyarakat. Kepekaan semacam itu telah dimiliki oleh sejumlah sastrawan zaman lampau sampai sekarang. Dalam hal ini, Damono (dalam Kratz, *ed.*, 2000: 650–653) mencontohkan bagaimana pujangga Ronggowarsito, telah mengkritik kebobrokan masyarakatnya pada abad kesembilanbelas. Fungsi novel dalam hal ini dianggap sebagai arena untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan untuk menyampaikan perlawanan terhadap ketimpangan tersebut.

Gerakan perempuan dan perkembangan isu kesetaraan yang relatif berkembang dengan baik dimasyarakat membuat dunia sastra pun mengalami perubahan dalam menggambarkan sosok perempuan. Realita masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan yang tergambar dalam karya sastra, bisa jadi adalah hal yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena karya sastra berfungsi salah satunya untuk mengelola realita yang ada di masyarakat menjadi sebuah bahan refleksi diri.

Pemberontakan adalah suatu proses perlawanan atau hal-hal yang bersifat menentang terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang dari peraturan maupun penyalagunaan kekuasaan yang telah ada. Pemberontakan termasuk kekerasan emosional, kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang lazim terjadi. Hal ini dapat dipicu dari relasi gender yang timpang, yang diwarnai dengan ketidakadilan dalam hubungan antara jenis kelamin yang berkaitan erat dengan kelamin. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari pada laki-laki. Hak istimewa yang didapat laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak diperlakukan dengan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan.

6. Hakikat Feminisme dalam Sastra

a. Pengertian Feminisme

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens dan proses pencarian solusinya perlu dilakukan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu perlu ada konsistensi dalam perjuangan strategis jangka panjang dalam rangka memperkokoh pencapaian tujuan seperti yang di inginkan bersama. Bagaimanapun suatu kelompok atau organisasi lebih sulit diintimidasi ataupun dikalahkan dibandingkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh individu.

Kaitannya dengan itu maka muncullah aliran-aliran pemikiran yang lebih kita kenal dengan sebutan feminisme. Feminisme tidak dapat melepaskan dirinya dari konteks politik ataupun yang lainnya. Feminisme tumbuh sebagai gerakan sekaligus pendekatan yang berusaha merombak struktur yang ada karena dianggap telah mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Pendekatan feminisme berusaha merombak cara pandang kita terhadap dunia dan berbagai aspek kehidupannya.

Nugroho (2011: 62) menyatakan feminisme telah menggoyahkan konsep objektivitas yang sangat diangung-agungkan sebagai salah satu tiang ilmu pengetahuan. Feminisme justru menganggap bahwa pengintegrasian perspektif dan pengalaman perempuan sebagai salah satu pijakan untuk mengembangkan tingkat kebenaran (*thurt*) yang lebih tinggi. Mereka juga beranggapan bahwa konsep objektivitas yang selama ini di dengung-dengungkan dan dianggap sebagai kebenaran justru amat jauh dari esensi kebenaran sesungguhnya karena konsep itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dan perspektif kaum laki-laki.

Gerakan kaum perempuan pada hakikatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada

kaum laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan gerakan reformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultur, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Feminisme menurut Bhasin (1996: 5) adalah sebuah kesadaran tentang ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Feminisme mengandung 3 konsep yang sangat penting, yaitu:

- 1) Feminisme adalah sebuah keyakinan bahwa tidak ada perbedaan seks, yaitu menentang adanya posisi hirarkis yang menyebabkan posisi superior dan inferior diantara jenis kelamin
- 2) Feminisme adalah sebuah pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi kontruksi sosial budaya yang merugikan perempuan
- 3) Feminisme menggugat perbedaan yang mencampuradukkan seks dan gender sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Feminisme merupakan paham yang memperjuangkan kaum perempuan sebagai manusia merdeka seutuhnya. Sehingga menyadarkan kaum perempuan tentang eksistensi pribadinya sendiri. Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan atau keadilan hak antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik, ekonomi, sosial, budaya.

(Sugihastuti dan Suharto, 2005: 4) feminisme memperjuangkan dua hal yang selama ini tidak dimiliki kaum perempuan pada umumnya, yakni persamaan derajat dengan laki-laki dan otonomi untuk menemukan apa yang baik bagi dirinya. Perempuan cenderung ter subordinasi. Kedudukannya di dalam masyarakat lebih rendah dari pada laki-laki.

b. Aliran-aliran dalam feminisme

Gender merupakan fenomena sosial yang memiliki kategori analisis yang berbeda-beda. Pada dasarnya komitmen dasar kaum feminis adalah terwujudnya kesetaraan dan menolak ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga muncul perbedaan pandangan antar feminis terhadap persoalan *gender* yang akan dibangun. Dari perbedaan pandangan tersebut melahirkan aliran-aliran feminisme. Aliran feminisme merupakan gambaran dinamika wacana feminisme. Berikut ini sketsa tentang ide dasar aliran feminisme yang telah mempengaruhi perkembangan feminisme sebagai pemikiran akademis maupun gerakan sosial menurut Kadarusman (2005: 27), yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Sosialis.

Feminisme Liberal berarti, bahwa akar penindasan perempuan terletak pada tidak adanya hak yang sama, untuk memajukan dirinya dan peluang kebudayaan yang sama. Perempuan mendapat diskriminasi hak, kesempatan, kebebasannya karena ia perempuan. Untuk melawannya ia mengajukan kesetaraan antara pria dan perempuan. Para feminis liberal menolak otoritas patriarkal yang dijustifikasi dogma agama, menolak perlakuan khusus yang diberikan pada perempuan. Tetapi masih mengakui perbedaan fungsi reproduksi, bagaimanapun fungsi reproduksi bagi perempuan akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Feminisme Radikal perintisnya adalah Charlotte Perkins Gilman, Emma Goldman dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan bahwa perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Feminisme radikal kontemporer berkembang pesat pada tahun 1960-1970-an di New York AS. Aliran ini melihat penindasan perempuan bukan sebagai produk kapitalisme melainkan bersumber dari semua sistem penindasan. Aliran ini radikal karena memfokuskan pada akar dominasi pria dan klaim bahwa semua bentuk penindasan adalah perpanjangan dari supremasi pria.

Feminisme Marxis dapat dikatakan sebagai kritik terhadap feminisme liberal. Karya Frederick Engels, *The Origins of The Family, Private Property and The State*, yang ditulis pada tahun 1884 merupakan awal mula pemikiran Marxis tentang penyebab penindasan perempuan. Penindasan terhadap perempuan akibat tindakan individual yang disengaja melainkan hasil dari struktur politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun dalam sistem kapitalisme. Argumentasi kaum Marxis didasarkan kepada persoalan ketidakadilan dalam pembagian kerja dan status kepemilikan.

Feminisme Sosialis memahami penindasan terhadap perempuan melalui sudut pandang teori epistemologi yang mendalilkan bahwa semua pengetahuan mempresentasikan kepentingan dan nilai-nilai kelompok sosial tertentu. Komitmen dasar feminisme sosialis adalah mengatasi penindasan kelas. Menurut aliran sosialis, konsep "*the personal is political*" dalam aliran feminisme radikal dapat memperluas konsep Marxis tentang dasar-dasar material suatu masyarakat, untuk memasukkan reproduksi sama dengan produksi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aliran feminisme ada lima. Aliran tersebut adalah aliran feminisme Radikal, feminisme Liberal, feminisme Marxis, Sosialis, dan feminisme

Postmodernis. Aliran feminisme merupakan gambaran dinamika wacana feminisme.

c. Kritik Sastra Feminisme

Yudiono K.S. (2009: 223) menyatakan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berurusan dengan telaah kritis tentang karya sastra tertentu dengan perumusan, klasifikasi penerangan, dan penilaian terhadap karya-karya sastra. Dengan demikian, sudah jelas bahwa sasaran atau objek kritik sastra adalah teks atau karya sastratertentu. Namun, berhubung karya sastra mana pun merupakan ciptaan pengarang dan konsumsi masyarakat pembaca, maka pada batas-batas tertentu kritik sastra dapat berurusan atau bersentuhan dengan dunia pengarang dan pembaca. Akan tetapi, pusat perhatian kritik sastra adalah karya sastra itu sendiri, sedangkan pelakunya adalah siapa pun pembaca yang terbilang kreatif, kritis, dan profesional.

Kritik sastra feminis berasal dari hasrat para feminis untuk mengkaji karya penulis wanita dimasa silam untuk mewujudkan citra wanita dalam karya penulis pria yang menampilkan wanita sebagai makhluk dengan berbagai cara ditekan, disalahkan, serta disepelekan oleh tradisi patriarkat yang dominan.

Kritik sastra feminis sendiri berawal di Amerika Serikat pertengahan abad ke-20 menawarkan gagasan yang berpihak kepada kaum perempuan, baik sebagai pengarang maupun pembaca. Pandangan dasarnya menyatakan bahwa selama ini posisi kaum wanita selalu dibawah lelaki, padahal dalam hal tertentu potensi perempuan tidak selemah yang dibayangkan oleh kaum laki-laki. Menurut Yudiono K.S. (2009: 223) menyatakan bahwa tujuan kritik sastra feminis adalah. (1) menafsirkan dan menilai kembali gejala sastra yang telah berkembang pada abad-abad yang silam, (2) membuka ruang gerak yang berkembang antara pengarang atau kritikus wanita dengan

kritikus laki-laki dalam memahami dan menilai karya para pengarang wanita, dan (3) meninjau kembali kaidah-kaidah kritik sastra yang sudah mapan selama berabad-abad, sehingga berkembang kaidah-kaidah baru yang lebih mampu memahami berbagai gejala kemanusiaan.

Sugiarti dan Suharto (dalam Mansrastuty 2010) mengemukakan kritik sastra feminis adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang menjadi perbedaan diantara semuanya yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan pada situasi luar yang mempengaruhi situasi karang mengarang.

Kritik sastra feminis termasuk di dalamnya adalah membeberkan perempuan menurut stereotipe seksual, baik dalam kesusastraan maupun dalam kritik sastra dan menunjukkan bahwa aliran-aliran serta cara-cara yang tidak memadai telah digunakan untuk mengkaji tulisan perempuan secara tidak adil dan tidak peka. Meskipun ada perbedaan di antara masing-masing pengertian tersebut, tetapi secara substansial pengertian-pengertian tersebut memiliki kesamaan maksud. Dapat dikatakan bahwa semua pengertian tersebut diturunkan dari pengertian etimologisnya, yaitu berkaitan dengan tindakan menghakimi atau menilai baik buruk karya sastra.

Beberapa batasan pengertian kritik sastra tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kritik sastra merupakan suatu cabang studi sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melalui interpretasi (penafsiran), analisis (penguraian), dan penilaian (evaluasi). Adapun perbedaan ketiga tahapan kritik sastra tersebut adalah sebagai berikut. *Interpretasi* adalah upaya memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran berdasarkan sifat-sifat karya sastra itu. Dalam artinya yang sempit, interpretasi adalah usaha untuk

memperjelas arti bahasa dengan sarana analisis, parafrasa, dan komentar. Interpretasi dipusatkan terutama pada kegelapan, ambiguitas, dan kiasan-kiasan. Dalam arti luas interpretasi adalah menafsirkan makna karya sastra berdasarkan unsur-unsurnya beserta aspek-aspeknya yang lain, seperti jenis sastranya, aliran sastranya, efek-efeknya, serta latar belakang sosial historis yang mendasari kelahirannya.

Analisis adalah penguraian karya sastra atas bagian-bagian atau norma-normanya. Seperti menganalisis unsur alur cerita, tokoh-tokoh dan perwatakannya, latar, tema, judul, sudut pandang cerita, serta bahasa yang digunakan berarti kita telah masuk ke dalam tubuh karya sastra itu dan melakukan pemahaman terhadapnya.

Selanjutnya, *penilaian* adalah usaha menentukan kadar keindahan (keberhasilan) karya sastra yang dikritik. Penentuan nilai suatu karya sastra tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi harus berdasarkan pada fenomena yang ada dalam karya yang akan dinilai, kriteria dan standar penilaian, serta pendekatan yang digunakan.

Dengan mengetahui nilai karya sastra, maka kita dapat memilah-milah mana karya sastra yang bernilai dan mana yang tidak, juga mana yang bermutu tinggi dan mana yang bermutu rendah. Yang perlu kita catat adalah bahwa dalam menilai suatu karya sastra kita dituntut mensikapi secara objektif dengan disertai alasan-alasan. Artinya, penentuan nilai haruslah mendasarkan pada data-data yang ada. Dalam konteks kritik sastra, suatu karya sastra dinilai baik atau buruk haruslah berdasarkan data-data yang ada dalam karya sastra yang kita nilai.

Penelitian atau kajian sastra adalah kegiatan menyelidiki, menganalisis, dan memahami karya sastra secara sistematis dengan mendasarkan kepada kerangka teori dan pendekatan ilmiah tertentu.

Tujuan penelitian atau kajian sastra adalah untuk memahami fenomena tertentu yang terdapat dalam karya sastra, termasuk memahami makna karya sastra. Contoh kajian sastra adalah memahami struktur naratif atau struktur penceritaan novel *Sitti Nurbaya* atau memahami tema-tema novel Indonesia periode tertentu (misalnya periode 1980-an). Berbeda dengan kritik sastra yang harus menunjukkan evaluasi atau nilai baik buruk karya yang dikritik, maka pada penelitian atau kajian sastra tidak selalu harus diakhiri dengan penilaian. Karena tujuan kajian atau penelitian sastra memang bukan menentukan nilai baik buruk suatu karya sastra, akan tetapi lebih pada memahami fenomena-fenomena karya sastra secara sistematis dan berdasarkan pada kerangka teori dan metode (pendekatan) tertentu (baca: ilmiah).

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian feminisme bukan lagi menjadi penelitian yang asing bagi sebagian orang. Sebab penelitian ini seringkali dijadikan sebagai objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Begitu pula dengan penelitian feminisme yang mengkaji karya Oka Rusmini dalam novel *Tarian Bumi* sudah banyak dibahas, namun untuk mengkaji secara lebih luas dari segi ketidakadilan gender dan perlawanan perempuan terhadap tradisi jarang diteliti. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas kajian sastra feminis adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian dari Endriani Dwi Siswanti yang ditulis pada tahun 2003 yang berjudul “Perempuan di Titik Nol, Perlawanan Perempuan Melawan Tatanan Konservatif”. Dalam penelitian ini Endriani memandang bahwa dalam novel perempuan di titik nol menjadikan sistem patriarkat diposisikan sebagai akar penindasan perempuan.

Kedua yaitu penelitian skripsi oleh Sri Yuniarti Tripungkasingtyas yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul “Relasi dan Peran Gender Perempuan Bali dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini Tinjauan Sastra Feminis”. Dalam skripsi tersebut 3 bagian penting yaitu: (1) relasi gender dalam novel *Tempurung* terbagi dalam tiga bagian yaitu, perempuan sebagai subordinat atau

tokoh perempuan dijadikan objek dari kekuasaan laki-laki, perempuan sebagai superordinat yaitu perempuan yang berkuasa terhadap tokoh laki-laki, dan yang terakhir perempuan sebagai koordinat yaitu tokoh perempuan dan laki-laki sama-sama saling menghargai. Tokoh laki-laki memiliki posisi yang dominan dalam relasinya dengan tokoh perempuan yang terlihat pada perempuan sebagai subordinat, (2) peran gender sebagian besar didominasi oleh tokoh perempuan terutama dalam sektor domestik dan peran ganda. Peran gender dalam novel *Tempurung* dibagi dalam tiga bagian yaitu domestik, publik, dan peran ganda, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi relasi dan peran gender terbagi atas lima bagian yaitu faktor kasta, faktor budaya, faktor kungkungan tradisi, faktor lingkungan sosial dan psikologis. Faktor yang paling mempengaruhi terjadi pada faktor budaya karena masyarakat Bali mengadopsi sistem patrilineal, yaitu sistem yang mengikuti garis bapak sehingga menempatkan posisi laki-laki lebih penting dibandingkan perempuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tampak bahwa sebagian besar menunjukkan bahwa kehidupan tokoh perempuan masih didominasi oleh tokoh laki-laki.

Ketiga penelitian dengan judul “Seksualitas perempuan Bali dalam Hegemoni Kasta Kajian Sastra Feminis pada Dua Novel Karangan Oka Rusmini” sebuah kajian kritik sastra feminis yang ditulis pada tahun 2014 dan diterbitkan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai konflik internal yang terjadi pada perempuan Bali. Konflik yang muncul karena kasta. Beberapa kasta perempuan Bali sudara yang menikah dengan laki-laki dari kasta brahmana dilarang sembayang di merajan kaum brahmana. Perempuan kasta brahmana yang menikah dengan kasta sudra dianjurkan menggugurkan kandungannya ketika hamil, dan perempuan dilarang menyembah orang tua dan tidak dianggap lagi sebagai anak. Dalam pandangan feminis tentunya hal ini sangat mengerdilkan dengan membunuh kebebasannya sebagai manusia. Tentunya pada kasus ini telah melanggar konvensi Indonesia. Penelitian ini mencoba memaparkan pergerakan perempuan Bali mengalami dominasi seksualitas oleh laki-laki.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian dengan objek novel *Tarian Bumi* karya Oka Rusmini ini meneliti tentang ketidakadilan gender dan perlawanan terhadap tradisi. Data penelitian ini diambil dari unsur-unsur cerita dalam novel. Dari data tersebut kemudian dilakukan pemilihan data yang terindikasi adanya ketidakadilan gender dan bentuk perlawanan perempuan terhadap tradisi yang dialami perempuan Bali. Adapun kerangka berpikir dari perlawanan perempuan terhadap tradisi kajian kritik sastra feminis adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

